



Kemiskinan Masyarakat Petani di Desa Bone, Kec. Bajeng, Kab. Gowa

Lisa Aulia Putri

Universitas Muhammadiyah Makassar

lisaauliaputri728@gmail.com

Sam'un Mukramin

Universitas Muhammadiyah Makassar

sam_un88@yahoo.co.id

Korespondensi penulis: lisaauliaputri728@gmail.com

Abstract. *Poverty is a fundamental problem and is the center of attention of governments in various countries. There is a strategy that supports poverty alleviation, namely the availability of accurate poverty data so that reliable measurement results can be obtained and can be used as policy making that aims to focus on paying attention to the condition of the poor. Poverty is defined as the level of a person's inability to meet standard needs. Poverty is classified into several parts. The first group is absolute poverty, namely poverty experienced by a person because of low income and unable to meet his needs. The second group is relative poverty, or the degree of poverty experienced by someone with conditions above the poverty line but at a distance between poor and non-poor.*

Keywords: *Village, Poverty, Society, Farmers*

Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah yang mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. Terdapat strategi yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ialah tersedianya data kemiskinan yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil pengukuran yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi masyarakat miskin. Kemiskinan didefinisikan sebagai level ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar. Kemiskinan digolongkan menjadi beberapa bagian. Golongan pertama adalah kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang dialami seseorang karena pendapatan rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan kedua yaitu kemiskinan relatif, atau derajat kemiskinan yang dialami seseorang dengan kondisi di atas garis kemiskinan tetapi berada pada jarak antara miskin dan non miskin.

Kata kunci: Desa, Kemiskinan, Masyarakat, Petani

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah yang mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. Terdapat strategi yang mendukung dalam penanggulangan kemiskinan ialah tersedianya data kemiskinan yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil pengukuran yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi masyarakat miskin. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan dan dipergunakan untuk menentukan target masyarakat miskin yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka (Suryani et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan tumbuh tanpa pertumbuhan penduduk, meskipun pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi sering berjalan beriringan. Para ahli mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti saat pendapatan nasional naik dari waktu ke waktu. Hal ini juga menunjukkan bahwa kapasitas produksi dan pelayanan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan produk maupun jasa secara keseluruhan (Sukarno dan Rapanna, 2017). Seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan yang mendatangkan lebih banyak pendapatan bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi pada hakikatnya merupakan proses penggunaan input produksi untuk menghasilkan output, yang pada akhirnya mengarah pada resiprositas atas faktor-faktor produksi masyarakat. Pendapatan mereka yang memiliki faktor-faktor produksi diharapkan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Fajri & Iriani, 2022).

Pengaruh kemiskinan terhadap pengangguran terbukti tidak berpengaruh signifikan. Efek buruk dari pengangguran yaitu ketiadaan pendapatan yang menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Pengangguran yang berkepanjangan dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk atas diri penganggur dan keluarganya. Apabila keadaan pengangguran disuatu negara sangat buruk akibatnya masyarakat miskin semakin bertambah jumlahnya serta mengakibatkan kekacauan politik dan sosial yang berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat

dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Pemerintah seharusnya mengatasi masalah tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga dampak dari masalah pengangguran dapat teratasi, karena tingkat pengangguran juga memberikan kontribusi yang amat besar terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin (Dwi Radila et al., 2021).

Kemiskinan didefinisikan sebagai level ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar. Kemiskinan digolongkan menjadi beberapa bagian. Golongan pertama adalah kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang dialami seseorang karena pendapatan rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan kedua yaitu kemiskinan relatif, atau derajat kemiskinan yang dialami seseorang dengan kondisi di atas garis kemiskinan tetapi berada pada jarak antara miskin dan non miskin. Golongan ketiga adalah kemiskinan struktural, yakni level kemiskinan yang diderita oleh seseorang yang mengalami kemiskinan tetapi mereka lebih bersikap enggan untuk melakukan perbaikan hidupnya hingga ada bantuan untuk dapat keluar keadaan tersebut (Faizin, 2021).

Kemiskinan berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien sebesar -0.955433 , artinya ketika kemiskinan naik 1% maka menyebabkan indeks pembangunan manusia turun sebesar 0.955433 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Bank Dunia pada 2007 menggunakan ukuran US\$ 2 - PPP (purchasing power parity) /kapita /hari, yaitu ukuran kemiskinan yang dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan standar Bank Dunia, ternyata secara empiris sering "tidak bisa atau kurang tepat" menjelaskan fenomena kemiskinan. Terutama, membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan. Pengukuran kemiskinan dengan standar Bank Dunia didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Namun terbukti, tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi (Utami, 2020).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang maupun sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal. Upaya penanggulangan di Indonesia sudah menjadi prioritas dalam rencana

kerja pemerintah yang dituang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN kemudian dibagi menjadi empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang dimana tahun 2015 sampai tahun 2019 masuk ke dalam periode ketiga (Vania Grace Sianturi et al., 2021).

Kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang selalu dihadapi di setiap negara. Masalah sosial ini terus terjadi bertahun-tahun dengan berbagai kebijakan untuk mengatasinya. Kriminalitas merupakan puncak permasalahan karena dampak dari kriminalitas meluas ke sektor-sektor lain seperti mengganggu pertumbuhan ekonomi (Detotto & Otranto, 2010). Selain itu fenomena kriminalitas dianggap sesuatu yang berbahaya (Sari & Azhar, 2019) (Fachrurrozi et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan suatu peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Dwi Radila et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu masalah jangka panjang yang harus dilakukan oleh setiap negara. Dimana sangat diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Setiap negara mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab sehat tidaknya perekonomian suatu negara. Dan pertumbuhan ekonomi menjadi syarat mutlak untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa. Dan bila suatu negara tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya maka akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang baru seperti tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan produk domestik bruto (PDB) (Ningsih & Andiny, 2018).

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh negara maju maupun negara berkembang. Hanya saja tingkat kemiskinan penduduk di negara berkembang lebih tinggi ketimbang di negara maju (Hakim & Syaputra, 2020).

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu hal utama yang dihadapi oleh negara Indonesia, dengan permasalahan yang beragam (Müller, 2015; Sawitri, 2020; Zulfa et al., 2020). Permasalahan kemiskinan khususnya di era pandemic Covid-19 merupakan persoalan multidimensi yang dihadapi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan bagi negara-negara berkembang dan terlebih lagi bagi negara miskin. Hal tersebut terjadi karena sektor ekonomi di suatu negeri tidak berjalan dengan baik disebabkan adanya keterbatasan pergerakan manusia yang ditimbulkan oleh Covid-19 (Komala et al., 2020) (Yusriadi et al., 2020).

Penanggulangan kemiskinan memerlukan kajian yang mendalam dan akurat untuk merumuskan strategi terbaik, yang diawali dengan mengenali secara mendalam karakter dasar masyarakat dan penyebab kemiskinan itu sendiri. Penyamaan persepsi yang tepat tentang konsep, indikator serta target prioritas penanggulangan kemiskinan, menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran (Arifin, 2020).

KAJIAN TEORITIS

Dalam teori struktural-fungsional, teori ini berfokus pada peran dan fungsi masyarakat dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks kemiskinan, teori ini dapat menjelaskan bagaimana struktur sosial, seperti sistem ekonomi, politik, dan pendidikan, mempengaruhi kemiskinan. Misalnya, ketimpangan dalam distribusi kekayaan atau kekurangan peluang pendidikan dapat menyebabkan kelompok tertentu terperangkap dalam kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2013, p. 64), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau dengan menghubungkan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jenis metode ini digunakan untuk menyajikan data secara menyeluruh dan mendalam terkait dengan literasi terhadap

peran gereja di dalam kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bone, Kec. Bajeng, Kab. Gowa. Obyek kajian dalam penelitian ini meliputi peran gereja dalam masyarakat, khususnya dalam fungsinya kiprahnya memberikan sumbangsih di dalam bidang ekonomi masyarakat (Nugroho, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup disuatu wilayah tertentu (Siregar, 2008).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. (Adit, 2010). Kemiskinan umumnya dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kelangsungan hidup. Secara umum, kemiskinan merujuk pada keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar tentang kemiskinan. Hakekatnya, belum ada keberlanjutan (sustainability) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia memang terus dilakukan sampai saat ini, baik melalui kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi penurunan penduduk miskin tidak terlalu signifikan dan relatif masih cukup banyak. Pemerintah sudah berjuang terus

menurunkan penduduk miskin didaerahnya dengan berbagai strategi, baik melalui kebijakan fiskal dalam APBD, maupun dengan melibatkan masyarakat miskin itu sendiri. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menjadikan penduduk miskin sebagai subjek bukan sebagai objek sehingga penduduk miskin dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan. (MUAFAIAH, 2019)

Kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan sosial merupakan masalah global, yang usianya sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri, khususnya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang (nama lain yang dipopulerkan oleh belahan Eropa untuk memerhalus sebutan bagi negara-negara miskin). Indonesia misalnya, era krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang telah melahirkan buah pahit berupa kemiskinan dan pengangguran, hal yang masih saja sebagai permasalahan yang belum terselesaikan hingga hari ini. Angka statistik tetap memberikan informasi bahwa masih banyak jumlah penduduk yang berkulat dalam kelompok masyarakat miskin. Persoalan yang sedang terjadi bukan hanya terletak dalam minimnya kesempatan kerja dan semakin banyaknya perusahaan/ industri yang gulung tikar (tutup) sehingga menyebabkan banyak karyawan diberhentikan (PHK); tetapi juga tingginya biaya hidup dan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat oleh karena harga barang dan jasa yang terkadang tidak stabil. Akses penghidupan layak yang terbatas juga menjadi problematika lain (Sipahutar, 2020).

Upaya Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa

Kemiskinan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan mendasar seperti pangan, perumahan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses ke pekerjaan yang layak. Ini dapat mengarah pada kondisi kehidupan yang tidak sehat, kelaparan, kurangnya pendidikan, ketidakstabilan sosial, dan ketergantungan pada bantuan sosial.

Pengukuran kemiskinan seringkali menggunakan parameter pendapatan atau konsumsi, dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan atau konsumsi di bawah tingkat kebutuhan dasar menentukan status kemiskinan seseorang. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan dimensi lain dari kemiskinan seperti akses terhadap layanan dasar, ketimpangan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah dan organisasi lainnya berusaha untuk mengembangkan program dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, akses ke pasar kerja, pendidikan, serta infrastruktur dan layanan dasar lainnya untuk membantu individu dan kelompok masyarakat yang miskin dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan kondisi hidup mereka.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan (Issue & Hasanuddin, 2022).

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh dan merupakan muara dari masalah sosial lainnya (Abduh, 2012).

Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar karena adanya hubungan kausalitas antara kondisi kemiskinan dengan berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Adapun beberapa alasan mengapa kemiskinan dapat memiliki dampak yang menyebar:

1. Keterbatasan Akses Sumber Daya: Kemiskinan membatasi akses individu dan masyarakat terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, perumahan yang layak, pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.

Keterbatasan ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ketika sebagian besar masyarakat dalam suatu wilayah mengalami kemiskinan, kualitas hidup secara keseluruhan akan terpengaruh, dan lingkungan menjadi rentan terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi.

2. **Siklus Kemiskinan:** Kemiskinan seringkali menyebabkan terjadinya siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Ketika seseorang atau suatu keluarga hidup dalam kondisi kemiskinan, mereka mungkin kesulitan untuk mengakses pendidikan yang memadai, peluang pekerjaan yang baik, atau modal usaha untuk memulai bisnis. Hal ini menyebabkan generasi berikutnya menghadapi keterbatasan serupa, sehingga kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. **Ketimpangan Sosial:** Kemiskinan dapat menyebabkan meningkatnya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketika sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan, kesenjangan antara mereka yang kaya dan miskin menjadi lebih besar. Ketimpangan ini dapat menyebabkan frustrasi, ketegangan sosial, dan ketidakstabilan dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial dan gangguan keamanan.
4. **Kesehatan dan Gizi yang Buruk:** Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang buruk dan gizi yang tidak memadai. Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit, kelaparan, malnutrisi, dan kecacatan. Dampak buruk ini tidak hanya mempengaruhi individu yang miskin, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan karena menyebabkan penurunan produktivitas, keterlambatan perkembangan anak, dan beban sosial dan ekonomi yang meningkat.
5. **Penurunan Produktivitas Ekonomi:** Kemiskinan dapat menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Kondisi kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi dalam sumber daya manusia, dan membatasi peluang usaha dan pekerjaan yang produktif. Akibatnya, potensi ekonomi suatu wilayah tidak dapat terwujud sepenuhnya, dan dampaknya dapat menyebar ke sektor ekonomi lainnya.

Dampak yang menyebar dari kemiskinan mencerminkan interkoneksi dan saling ketergantungan antara berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan harus mencakup pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam memerangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi pengaruh kemiskinan terhadap tingkat pendidikan di desa, diperlukan upaya komprehensif. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur pendidikan, penyediaan beasiswa atau bantuan keuangan bagi keluarga miskin, pelatihan guru yang baik, kampanye kesadaran pendidikan, dan program pendidikan alternatif yang fleksibel untuk mereka yang terpaksa bekerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di pedesaan (Saputri & Anwar, 2019).

Objek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Penghitungan luas tanaman perkebunan besar adalah pada keadaan akhir tahun dan tidak termasuk yang luasnya kurang dari 5 hektar. Bentuk produksi perkebunan adalah; sayuran hijau, kacang hijau, lombok kecil maupun lombok besar.

1. Perusahaan Perkebunan

Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha adri instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Usaha budidaya tanaman perkebunan diluar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumah tangga petani tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut usaha perkebunan rakyat.

2. Produksi Kebun

Produksi kebun atau lazim disebut produksi primer adalah produksi/hasil yang dipanen dari usaha perkebunannya tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut.

Contoh produksi kebun/produksi primer dari :

- a. Perkebunan karet produksi primernya adalah Latex, Lumb
- b. Perkebunan kelapa sawit produksi primernya adalah Tandan Buah Segar
- c. perkebunan kakao produksi primernya adalah Buah Basah

3. Produksi Olahan

Pada umumnya perusahaan perkebunan mempunyai unit pengolahan sendiri sehingga produk yang dipasarkan sudah dalam bentuk barang hasil olahan. Produk olahan adalah produksi primer yang telah diolah menjadi suatu bentuk barang jadi atau barang setengah jadi, sehingga nilai ekonomisnya lebih tinggi.

4. Kebun inti

Kebun inti adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan dengan kelengkapan fasilitas pengolahan dan dimiliki oleh perusahaan perkebunan tersebut dan dipersiapkan menjadi pelaksana Perkebunan Inti Rakyat.

5. Kebun Plasma

Kebun plasma adalah kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan (Kebun Inti), serta ditanami dengan tanaman perkebunan. Kebun plasma ini semenjak penanamannya dipelihara dan dikelola kebun inti hingga berproduksi. Setelah tanaman mulai berproduksi, penguasaan dan pengelolaannya diserahkan

kepada petani rakyat (dikonversikan). Petani menjual hasil kebunnya kepada kebun inti dengan harga pasar dikurangi cicilan/angsuran pembayaran hutang kepada kebun inti berupa modal yang dikeluarkan kebun inti membangun kebun plasma tersebut.

Dalam objeknya pemberdayaan ekonomi masyarakat, masyarakat desa mempunyai hak untuk perannya dalam mendapatkan manfaat dari kemajuan dan hasil yang telah mereka capai dari proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat desa memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya dua posisi ganda maka usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerjasamanya dan komunikasi yang baik antara pemimpin dan yang di pimpin (Rasulong et al., 2020).

Pemberdayaan ekonomi dan kemiskinan adalah masalah pokok dan isu sentral pembangunan ekonomi dan sosial yang pada saat ini hingga beberapa tahun mendatang masih tetap relevan untuk terus dikaji di Indonesia.¹⁸ BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga filantropi Islam di Indonesia yang secara resmi dibentuk oleh negara dan telah berdiri di berbagai kota. BAZNAS sebagai lembaga yang dipercayai untuk mengelola dana zakat, juga turut bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat (Syahril et al., 2019).

Objek pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian masyarakat desa dengan memberikan akses, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Adapun beberapa objek yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa antara lain:

1. Pengembangan keterampilan: Salah satu aspek penting dari pemberdayaan ekonomi adalah pengembangan keterampilan. Masyarakat desa perlu dilengkapi dengan keterampilan yang relevan dan diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Pelatihan dan pendidikan keterampilan dapat diberikan dalam

berbagai bidang, seperti pertanian, kerajinan tangan, pengolahan makanan, teknologi informasi, dan kewirausahaan.

2. Peningkatan akses ke pasar: Masyarakat desa perlu memiliki akses yang lebih baik ke pasar untuk menjual produk atau layanan mereka. Ini dapat mencakup pengembangan jalur distribusi yang efisien, pemfasilan, pengembangan jaringan bisnis, dan peningkatan akses ke pasar lokal, regional, atau internasional. Pemberdayaan ekonomi juga dapat melibatkan pendampingan atau pendampingan dalam menjual produk, mengembangkan merek, dan memperluas jangkauan pasar.
3. Pemberian modal usaha: Salah satu hambatan yang dihadapi masyarakat desa adalah keterbatasan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Pemberdayaan ekonomi melibatkan penyediaan modal usaha melalui skema pinjaman mikro, program pembiayaan, atau penyediaan modal dari lembaga keuangan atau organisasi non-pemerintah. Selain itu, pelatihan keuangan dan manajemen juga diperlukan untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola dan menggunakan modal tersebut secara efektif.
4. Peningkatan akses ke sumber daya: Pemberdayaan ekonomi juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses masyarakat desa ke sumber daya yang penting untuk kegiatan ekonomi, seperti lahan, air, peralatan pertanian, infrastruktur, dan teknologi. Ini dapat dilakukan melalui program pemerintah atau kemitraan dengan organisasi atau lembaga yang dapat membantu dalam penyediaan sumber daya tersebut.
5. Pengembangan koperasi dan kelompok usaha: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha adalah objek pemberdayaan ekonomi yang penting. Koperasi dan kelompok usaha dapat memberikan manfaat seperti memperkuat kekuatan tawar-menawar dalam pasar, memfasilitasi pembelian bersama sumber daya atau bahan baku, dan menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi anggotanya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melibatkan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mengembangkan ekonomi mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Tata kelola organisasi yang baik dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik maka seluruh pihak perlu melaksanakan prinsip dasar tata kelola organisasi yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola organisasi disusun secara fleksibel sehingga dapat diimplementasikan bagi segala bentuk organisasi. Dalam prakteknya pengelolaan organisasi yang baik harus dibangun dan dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Organisasi harus membangun sistem dan pedoman tata kelola organisasi yang terintegrasi. Karyawan pun harus dibekali pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan apa yang akan dijalankan organisasi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara kontinyu terhadap proses-proses yang terjadi dalam sistem tata kelola yang sudah dibuat (Prawitno et al., 2019).

Penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan. Ustama (2006) menyatakan bahwa pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Atmanti (2005) juga menyatakan pentingnya investasi di bidang pendidikan karena dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka memutus rantai kemiskinan. Wiguna (2013) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2010. Majid (2014) menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan di sebagian kabupaten/kota di Aceh menyebabkan tingkat kemiskinan sangat tinggi mencapai 20 persen. Dapat disimpulkan bahwa tingkat dan mutu pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain di Aceh yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Rahmawati, 2019). Perbaikan mutu pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di level regional, Jawa Timur (Putrizahrah, 2019). Tingkat pendidikan juga terbukti dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan di level nasional, Indonesia periode 2012-2017 (Pahlawan & Ratna, 2018) (Wicaksono & Aliem, 2022).

Rumah tangga miskin perdesaan memiliki modal manusia dan modal keuangan yang relatif rendah dibandingkan rumah tangga kaya (tidak miskin). Pada umumnya kepala rumah tangga miskin berpendidikan setingkat sekolah dasar dan memiliki keterbatasan dalam mengakses bantuan kredit untuk usaha. Dimensi modal sosial yang berkontribusi paling tinggi terhadap pembentukan modal sosial rumah tangga miskin adalah rasa percaya, disusul oleh norma dan gotong royong. Sedangkan, dimensi modal sosial yang masih rendah, yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial dan jejaring social (Nasution, 2017).

Kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendidikan di desa. Berikut adalah beberapa pengaruh utama kemiskinan terhadap pendidikan di desa:

1. **Aksesibilitas:** Kemiskinan sering kali membatasi akses penduduk desa terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Desa yang miskin cenderung memiliki kurangnya infrastruktur pendidikan, seperti sekolah yang jauh atau dalam kondisi yang buruk. Ini mengakibatkan kesulitan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan dengan mudah.
2. **Biaya pendidikan:** Kemiskinan dapat menghambat kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka, termasuk biaya pendidikan. Buku, seragam, alat tulis, biaya sekolah, dan biaya transportasi adalah beberapa faktor yang mungkin menjadi beban keuangan bagi keluarga miskin di desa. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin dapat mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan atau bahkan terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
3. **Kualitas pendidikan:** Keterbatasan sumber daya dalam desa miskin sering kali memengaruhi kualitas pendidikan yang tersedia. Kurangnya dana menyebabkan fasilitas pendidikan desa mungkin kurang memadai dalam hal peralatan, buku, dan materi pembelajaran. Juga, kekurangan guru yang berkualitas dan terlatih dapat menjadi masalah di desa miskin, yang dapat mempengaruhi tingkat pendidikan yang diberikan.
4. **Rendahnya kesadaran pendidikan:** Kemiskinan seringkali terkait dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat desa. Orang tua yang miskin mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang pentingnya pendidikan

dan manfaat jangka panjangnya bagi anak-anak mereka. Akibatnya, mereka mungkin tidak memprioritaskan pendidikan atau mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.

5. Siklus kemiskinan: Ketika pendidikan terbatas akibat kemiskinan, ini dapat berkontribusi pada pemeliharaan siklus kemiskinan. Tanpa pendidikan yang memadai, generasi berikutnya juga cenderung menghadapi keterbatasan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini memperkuat kelanjutan kemiskinan di desa dan membuat sulit untuk mengubah situasi.

Kemiskinan dapat ditilik dari aspek ketimpangan sosial, yang dapat dilihat dari distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Dalam penelitiannya, Dumairy (1996) menemukan bahwa 20 persen kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi memiliki pendapatan lebih tinggi dari 40 persen kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah dan 40 persen yang berpendapatan rendah. Bank Dunia berpendapat bahwa Indonesia termasuk Negara yang memiliki ketimpangan rendah dalam hal distribusi pendapatan. Besarnya pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1984, 40 persen penduduk termiskin di pedesaan memperoleh 22,35 persen, kemudian meningkat menjadi 25,32 persen di tahun 1997, kecenderungan serupa juga dialami oleh penduduk di wilayah perkotaan (Tamunan, 2003: 108) (Nahak, 2022).

Kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial dalam suatu masyarakat. Ketimpangan sosial merujuk pada adanya perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan peluang antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Ketimpangan sosial dapat berkontribusi terhadap terjadinya dan memperburuk kemiskinan dalam beberapa cara diantaranya yaitu, konsentrasi kekayaan, aspek terhadap pendidikan dan kesempatan, ketidakadilan sistematis, dan penguasaan sumber daya. Pemahaman tentang ketimpangan sosial membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah kemiskinan. Upaya yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang dapat

membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong inklusivitas sosial dan ekonomi.

KESIMPULAN

1. Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup disuatu wilayah tertentu (Siregar, 2008).
2. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. (Adit, 2010). Kemiskinan umumnya dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kelangsungan hidup. Secara umum, kemiskinan merujuk pada keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak.
3. Kemiskinan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan mendasar seperti pangan, perumahan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses ke pekerjaan yang layak. Ini dapat mengarah pada kondisi kehidupan yang tidak sehat, kelaparan, kurangnya pendidikan, ketidakstabilan sosial, dan ketergantungan pada bantuan sosial. Pengukuran kemiskinan seringkali menggunakan parameter pendapatan atau konsumsi, dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan atau konsumsi di bawah tingkat kebutuhan dasar menentukan status kemiskinan seseorang. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan dimensi lain dari kemiskinan seperti akses terhadap layanan dasar, ketimpangan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan.
4. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah dan organisasi lainnya berusaha untuk mengembangkan program dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan

bantuan sosial, pelatihan keterampilan, akses ke pasar kerja, pendidikan, serta infrastruktur dan layanan dasar lainnya untuk membantu individu dan kelompok masyarakat yang miskin dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan kondisi hidup mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. (Issue & Hasanuddin, 2022) Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Abduh, S. M. T. A.-Q. A.-K.)Juz ‘Amma), diterj. O. M. B. T. J. ‘Amma M. A. A. M. (2012). *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya. Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Desember 2012. Edisi 8(2), 62–74.*
- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>
- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Dwi Radila, I., Priana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kemiskinan terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal Health Sains*, 2(6), 1054–1065. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.252>
- Fachrurrozi, K., Fahmiwati, Hakim, L., Aswadi, & Lidiana. (2021). Pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas di indonesia di tahun 2019. *Jurnal Real Riset*, 3(2), 173–178. <https://doi.org/10.47647/jrr>
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>

- Fajri, A. A., & Iriani, R. (2022). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2002-2021. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 53–66. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2555>
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>
- Issue, V., & Hasanuddin, U. (2022). *Development Policy and Management Review (DPMR) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN GOWA Analysis of Influencing Factors Poverty Level in Regency Area : A Case Study of Gowa Regency perekonomian* a. 2(1), 22–45.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- MUAFIAH, A. F. (2019). No TitleELENH. *Ayan*, 8(5), 55.
- Nahak, K. L. (2022). Determinan Faktor Sosial Dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Penduduk Di Indonesia. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(4), 10–22. <https://doi.org/10.32938/jep.v6i4.1756>
- Nasution, A. (2017). Kebijakan Pembentukan Modal Sosial Dan Pengurangan Kemiskinan Di Rumah Tangga Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.672>
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 53–61.
- Nugroho, F. J. (2019). Gereja Dan Kemiskinan: Diskursus Peran Gereja Di Tengah Kemiskinan. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3(1), 100. <https://doi.org/10.46445/ejti.v3i1.128>
- Prawitno, A., Politik, D., Fisip, P., & Hasanuddin, U. (2019). ANALISIS PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN GOWA Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten , memiliki otonomi asli . Walaupun dalam batasan otonomi asli , Desa dapat membangun kemampuan. *Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa*, 5(7), 50–60.
- Rasulong, I., Annisa, N., & Makassar, U. M. (2020). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah*. 3(April), 11–21.

- Saputri, S. F., & Anwar, P. H. (2019). Interelasi Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 91. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9545>
- Sipahutar, R. C. H. (2020). Kemiskinan, Pengangguran Dan Ketidakadilan Sosial. *Jurnal Christian Humaniora*, 3(1), 47–54. <https://doi.org/10.46965/jch.v3i1.120>
- Suryani, D., Sidoarjo, U. M., Fitriani, L., & Sidoarjo, U. M. (2022). *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan*. 10(1), 43–62.
- Syahril, S., Abdullah, W., & Syahrudin, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>
- Utami, farathika putri. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113.
- Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>
- Wicaksono, B. R., & Aliem, M. (2022). Investasi Pendidikan Memutus Rantai Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 12–24. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.213>
- Yusriadi, Y., Tahir, S. Z. bin, Awaluddin, M., & Misnawati, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan melalui Socialpreneur. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 115–120. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2529>